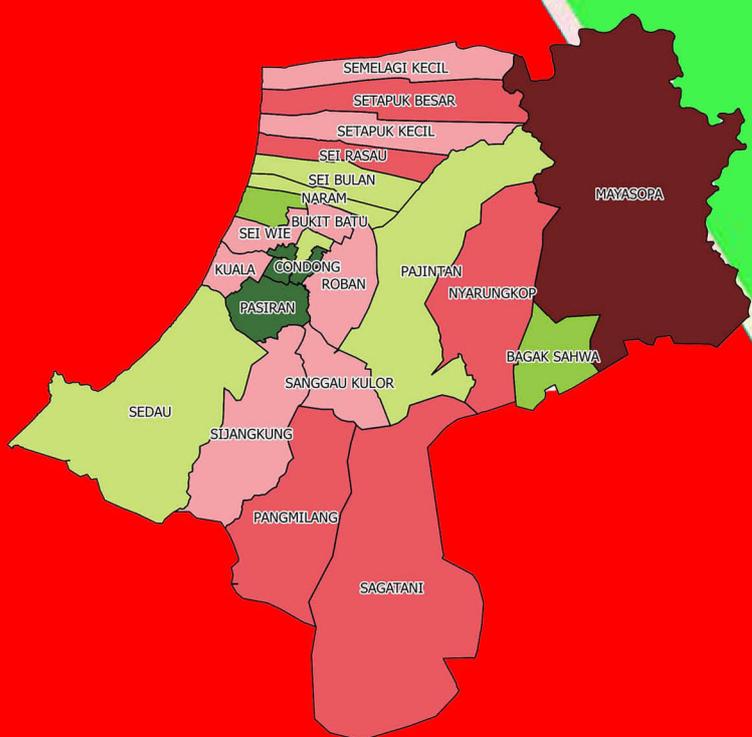


Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) **FSVA 2022** **KOTA SINGKAWANG**



Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kota Singkawang



SAMBUTAN WALI KOTA SINGKAWANG



Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan, hal ini menggambarkan bahwa apabila suatu Negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan pangan negara bisa terancam. Dalam Undang-Undang Pangan ini menekankan pada pemenuhan pangan

ditingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.

Tanggung jawab Pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata (seimbang) dan terjangkau. Masyarakat bertanggungjawab dan berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan perlindungan bagi orang perseorangan yang mengkonsumsi pangan.

Dalam rangka mendukung tanggungjawab Pemerintah tersebut, maka penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA*) level kelurahan se Kota Singkawang 2022 menjadi sangat krusial. Untuk ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang yang telah melaksanakan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA*) Kota Singkawang 2022 secara komprehensif, yang telah menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan mulai dari kondisi kronis sampai pada yang kurang kronis untuk setiap indikator ketahanan pangan seperti tingkat ketersediaan, akses, pemanfaatan dan kerentanan pangan pada tingkat kelurahan se Kota Singkawang.

Dengan adanya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA*) akan lebih mudah untuk membuat prioritas kebijakan, program dan kegiatan operasional untuk mengatasi masalah pangan di daerah, serta lebih memudahkan

menentukan langkah awal dan menentukan solusi akhir dari gerakan mengatasi masalah ketahanan pangan yang terjadi di Kota Singkawang ini.

Keberhasilan yang dicapai dalam pengembangan ketahanan pangan beberapa tahun terakhir ini dengan indikasi berkurangnya jumlah masyarakat rawan pangan di Kota Singkawang membuktikan bahwa kerjasama Pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah ketahanan pangan telah berlangsung dengan baik dan perlu diteruskan dan ditingkatkan, sehingga kedepan saya berharap Pemerintah dan masyarakat benar-benar dapat berperan aktif secara bersama-sama dalam menciptakan ketahanan pangan Kota Singkawang.

Akhirnya perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Organisasi Perangkat Daerah se Kota Singkawang dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA*) Kota Singkawang 2022. Mari kita tingkatkan ketahanan pangan di Kota Singkawang, agar tercipta sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas sehingga mampu mengakselerasikan pelaksanaan pembangunan Kota Singkawang untuk kecukupan energi dan protein demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang.

Singkawang, November 2022
Wali Kota Singkawang

Tjhai Chui Mie, S.E., M.H.



KATA PENGANTAR

Pemerintah Kota Singkawang tetap berkomitmen untuk mengatasi permasalahan pangan dan gizi yang terjadi di wilayah ini. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA*) Kota Singkawang 2022 diharapkan dapat menjadi suatu langkah awal untuk memantapkan strategi dan kebijakan serta prioritas kegiatan yang penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi maupun mungkin akan terjadi, baik bersifat kronis maupun transien.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA*) Kota Singkawang 2022 dibuat dalam tatanan yang sangat baik antara Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, untuk dapat informasi yang riil dan lengkap dengan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan pada seluruh wilayah Kota Singkawang yang digambarkan dalam 3 dimensi yaitu; Ketersediaan Pangan, Akses Pangan dan Pemanfaatan Pangan yang digambarkan dalam 5 (lima) indikator yang sangat berpengaruh terhadap kondisi ketahanan dan kerentanan pangan suatu wilayah pada level wilayah kelurahan.

Besar harapan kami dengan diluncurkannya peta ini dapat membawa suatu perubahan yang berarti dalam upaya peningkatan kewaspadaan dalam menghadapi masalah ketahanan pangan dan gizi di Kota Singkawang oleh semua pihak. Pada Kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat atas komitmen dan dukungan yang intensif dalam upaya penyusunan sehingga peta ini dapat diluncurkan, juga kepada Tim Pengarah, Tim Teknis Penyusunan FSVA dan semua pihak terkait yang telah membantu mulai dari penyusunan hingga penerbitannya.

Pada akhirnya kami berharap peta ini dapat bermanfaat demi tercapainya kondisi ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Kota Singkawang semakin baik dan saran untuk penyempurnaan sangat kami harapkan.

Singkawang, November 2022

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kota Singkawang



Dwi Yanti, S.T., M.T.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALI KOTA SINGKAWANG		i
KATA PENGANTAR		ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....		vii
 BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi		4
1.3. Metodologi		7
 BAB II KETERSEDIAAN PANGAN		 12
2.1. Sarana dan Prasarana Ekonomi		12
2.2. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan		16
 BAB III AKSES TERHADAP PANGAN		
3.1. Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah		19
3.2. Akses Transportasi		23
3.3. Strategi Peningkatan Akses Pangan		26
 BAB IV PEMANFAATAN PANGAN		
4.1. Akses Terhadap Air Bersih		27
4.2. Akses Tenaga Kesehatan		31
4.3. Dampak (Outcome) dari status Kesehatan		34
4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan		36
 BAB V KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT		
5.1. Kondisi Ketahanan Pangan		40
5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan		45
 BAB VI REKOMENDASI KEBIJAKAN		 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	5
Gambar 2.1.	Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi berdasarkan prioritas	14
Gambar 3.1.	Grafik Persentase Penderita Gizi Buruk Kota Singkawang 2017 – 2021	35
Gambar 3.2.	Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan	36
Gambar 4.1.	Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 1 Per Kecamatan	42
Gambar 4.2.	Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 2 Per Kecamatan	43
Gambar 4.3.	Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 3 Per Kecamatan	43
Gambar 5.1.	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Indikator FSVA Kota 2022	8
Tabel 1.2.	Bobot Indikator Individu	10
Tabel 2.1.	Analisis FSVA Tahun 2022 Berdasarkan Rasio Sarana dan Prasana Ekonomi	13
Tabel 2.2.	Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas	14
Tabel 3.1.	Analisis FSVA Tahun 2022 Berdasarkan Rasio Penduduk Miskin	20
Tabel 3.2.	Sebaran kelurahan dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas	21
Tabel 3.3.	Analisis FSVA Tahun 2022 Berdasarkan Akses Transportasi	24
Tabel 4.1.	Analisis FSVA Tahun 2022 Berdasarkan Akses Air Bersih	28
Tabel 4.2.	Sebaran kelurahan berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas	29
Tabel 4.3.	Analisis FSVA Tahun 2022 Berdasarkan Rasio Tenaga Kesehatan	31
Tabel 4.4.	Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas..	32
Tabel 4.5.	Persentase Penderita Gizi Buruk 2017-2021	34
Tabel 4.6.	Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan.....	35
Tabel 5.1.	Analisis FSVA Tahun 2022 Berdasarkan Komposit	40
Tabel 5.2.	Sebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan Prioritas	42

DAFTAR PETA

Peta 1.1	Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan terhadap jumlah rumah tangga	15
Peta 2.1.	Rasio Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk	22
Peta 2.2	Akses Penghubung yang memadai	26
Peta 3.1.	Rasio Akses Air Bersih	30
Peta 3.2.	Rasio Tenaga Kesehatan	33
Peta 4.1.	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Komposit	44

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi ketahanan pangan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kota merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; dan (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; dan (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi.

Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis FSVA 2022 Kota Singkawang menunjukkan bahwa kelurahan rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 14 kelurahan dari 26 kelurahan (53,85%) yang terdiri dari 1 kelurahan (3,85%) Prioritas 1; 5 kelurahan (19,23%) Prioritas 2; dan 8 kelurahan (30,77%) Prioritas 3. Kelurahan prioritas 1 tersebar 1 kelurahan di kecamatan Singkawang Timur; 5 Kelurahan prioritas 2 tersebar 2 kelurahan di kecamatan Singkawang Selatan, 1 kelurahan di Kecamatan Timur dan 2 kelurahan di kecamatan Singkawang Utara; 8 Kelurahan prioritas 3 tersebar 1 kelurahan di kecamatan Songkawang Selatan; 1 Kelurahan di Kecamatan Singkawang Timur; 2 Kelurahan di kecamatan Singkawang Utara; 1 kelurahan di Kecamatan Singkawang Barat; 3 kelurahan di Kecamatan Singkawang Tengah.
7. Karakteristik kelurahan rentan pangan ditandai dengan makin rendahnya rasio sarana penyedia pangan, daya beli terbatas karena kemiskinan terbatasnya akses terhadap air bersih serta penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata.
8. Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh: (1) Aspek Ketersediaan Pangan (Keterbatasan sarana penyedia pangan (2) Aspek terhadap pangan (Daya beli terbatas karena kemiskinan), dan (3) Aspek Pemanfaatan Pangan (Terbatasnya akses terhadap air bersih serta penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata. Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh: (1) Aspek Ketersediaan Pangan (Keterbatasan sarana penyedia pangan (2) Aspek terhadap pangan (Daya beli terbatas karena kemiskinan), dan (3) Aspek Pemanfaatan Pangan (Terbatasnya akses terhadap air bersih serta penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata.
9. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan kelurahan diarahkan pada kegiatan:
 - a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah;
 - b. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan;
 - c. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal;
 - D. Penyediaan tenaga kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Singkawang adalah salah satu kota/kabupaten yang ada di Propinsi Kalimantan Barat terletak diantara 0^o44'55,85" sd 101'21,51" Lintang Utara dan 108^o51'47,6" sampai dengan 109^o10'19" Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kota Singkawang adalah:

- Utara : Kab. Sambas
- Selatan : Kab. Bengkayang
- Barat : Laut Natuna
- Timur : Kab. Bengkayang

Luas Kota Singkawang adalah 504 km² atau sekitar 0,34 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Daerah Pemerintahan Kota Singkawang pada tahun 2021 terdiri dari 5 Kecamatan, dan 26 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas 224,48 km² atau 44,54 persen sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Singkawang Barat dengan luas sebesar 15,04 km² atau 2,98 persen dari luas wilayah Kota Singkawang.

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan orografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Rata-rata curah hujan di Kota Singkawang pada tahun 2021 berkisar antara 49,60 s/d 518,00 milimeter. Rata-rata curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan Agustus mencapai 518,00 milimeter, sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari, yaitu mencapai 49,60 milimeter.

Pada tahun 2021, jumlah hari hujan di Kota Singkawang berkisar antara 7 s/d 19 hari hujan. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan September mencapai 19 hari hujan dan jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan April yang mencapai 7 hari hujan.

Kota Singkawang pada tahun 2021 terdiri dari 5 Kecamatan yang terbagi menjadi 26 Kelurahan, 161 RW, dan 587 RT.

Berdasarkan Hasil sensus penduduk 2021, penduduk Kota Singkawang berjumlah sekitar 237.891 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 472 jiwa per kilometer persegi. Karena itu, persoalan mendesak bagi daerah adalah minimnya sumber daya manusia untuk mengelola pembangunan di daerah yang potensinya amat besar.

Penyebaran penduduk di Kota Singkawang tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Singkawang Barat merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 3.709 jiwa/km². Sebaliknya, Singkawang Timur dengan luas sekitar 32,99 persen dari total wilayah Kota Singkawang hanya dihuni 141 jiwa/km².

Berdasarkan laporan Perusahaan Listrik Negara Wilayah Kalimantan Barat Area Singkawang pada tahun 2021, total daya terpasang sebanyak 128 MW dengan total daya tersambung sebanyak 143.014.700 VA.

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk baik untuk memasak/minum maupun mencuci/mandi. Bagi daerah Kota Singkawang, khususnya di daerah pedalaman secara tradisional penggunaan air bersih masih bersumber dari sungai/danau dan air hujan. Akan tetapi di sebagian kecamatan air bersih dikelola sebagai komoditas industri oleh PDAM.

Untuk menyediakan sarana air bersih dan sehat, Perusahaan Daerah Air Minum terus berupaya meningkatkan peranannya. Pada tahun 2021 banyaknya air minum yang disalurkan mengalami peningkatan sebesar 13,41 persen yaitu dari 4.252,46 ribu m³ pada tahun 2020 menjadi 4822,82 ribu m³ di tahun 2021.

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Panjang jalan kota di wilayah Kota Singkawang sampai dengan tahun 2021 mencapai 442,62 kilometer. Dari panjang jalan tersebut 61,40 persen jalan sudah diaspal; 4,29 persen jalan beton, 10,71 persen jalan kerikil; dan 23,60 persen jalan tanah.

Bila ditinjau dari kondisinya, 38,50 persen jalan di Kota Singkawang kondisinya sudah baik; 20,17 persen kondisi sedang; 10,63 persen kondisi rusak; dan 30,70 persen kondisi rusak berat.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten/Kota dengan analisis sampai tingkat desa/kelurahan. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa/kelurahan, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten/Kota pada tahun 2022.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten/Kota menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa/kelurahan merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten/Kota akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

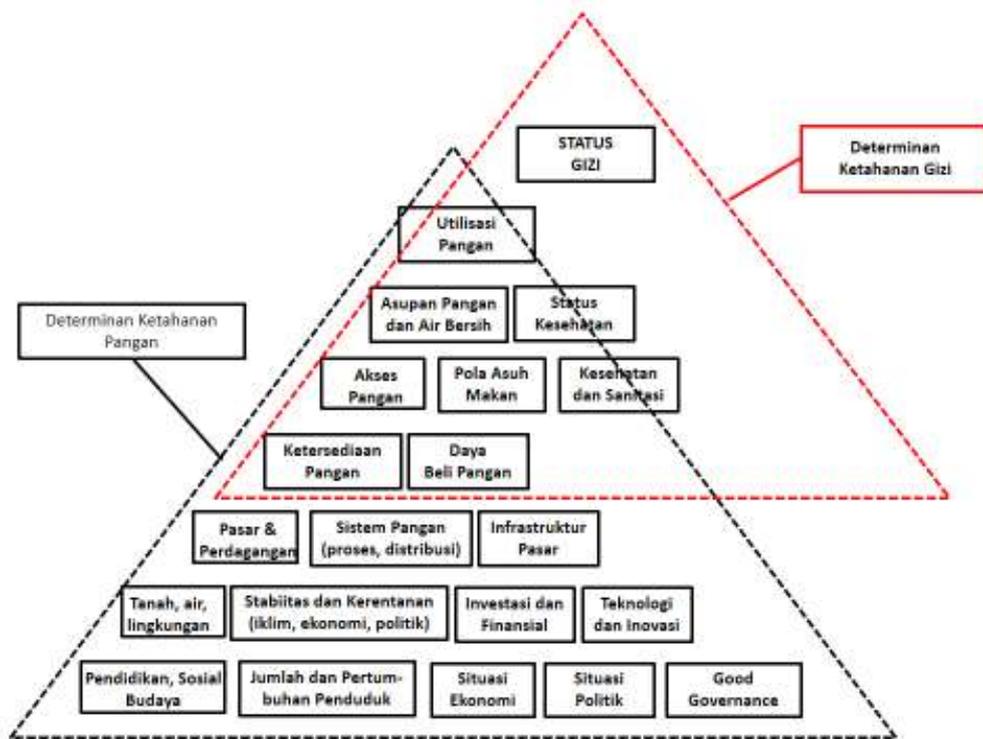
Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumahtangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan

sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan

transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

1.3.1. Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kota didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kota terdiri dari 5 (lima) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kota 2022

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga kelurahan	Potensi Desa 2021, BPS Jumlah Rumah Tangga 2021 dari Sensus Penduduk (SP) 2020
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk kelurahan	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan dari SP 2020
Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Kelurahan dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Kelurahan dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2021, BPS
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kelurahan	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga kelurahan	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kelurahan	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk kelurahan	Potensi Desa 2021, BPS Jumlah penduduk dari SP 2020

Sumber : Panduan Penyusunan FSVA Kabupaten/Kota BKP Kementan, 2022

1.3.2. Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot Kota
1.	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	1/3
Sub Total		1/3
2.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
3.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	1/6
Sub Total		1/3
4.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
5.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
Sub Total		1/3

- c. Mengelompokkan kelurahan ke dalam 5 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 5 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 \alpha_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

α_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB II

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dan lain-lain) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Tabel 2.1

Analisis FSVA Tahun 2022 Berdasarkan Rasio Sarana dan Prasarana Ekonomi

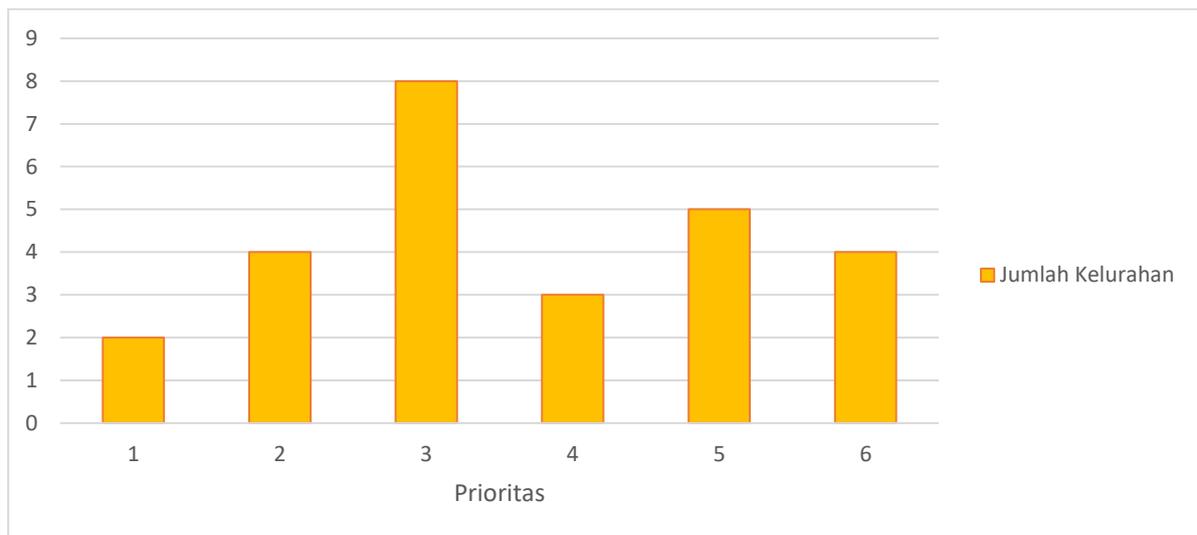
No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Prioritas Sarana
1	SINGKAWANG SELATAN	6172010	6172010001	SEDAU	4
2		6172010	6172010002	SIJANGKUNG	2
3		6172010	6172010003	PANGMILANG	3
4		6172010	6172010004	SAGATANI	5
5	SINGKAWANG TIMUR	6172021	6172021001	PAJINTAN	3
6		6172021	6172021002	SANGGAU KULOR	3
7		6172021	6172021003	BAGAK SAHWA	6
8		6172021	6172021004	NYARUMKOP	3
9		6172021	6172021005	MAYASOPA	2
10	SINGKAWANG UTARA	6172030	6172030001	SEI GARAM HILIR	6
11		6172030	6172030002	NARAM	5
12		6172030	6172030003	SEI BULAN	5
13		6172030	6172030004	SEI RASAU	3
14		6172030	6172030005	SETAPUK KECIL	5
15		6172030	6172030006	SETAPUK BESAR	3
16		6172030	6172030007	SEMELAGI KECIL	4
17	SINGKAWANG BARAT	6172040	6172040001	PASIRAN	4
18		6172040	6172040002	MELAYU	6
19		6172040	6172040003	TENGAH	1
20		6172040	6172040004	KUALA	2
21	SINGKAWANG TENGAH	6172050	6172050001	ROBAN	1
22		6172050	6172050002	CONDONG	6
23		6172050	6172050003	SEKIP LAMA	3
24		6172050	6172050004	JAWA	5
25		6172050	6172050005	BUKIT BATU	3
26		6172050	6172050006	SEI WIE	2

Sumber : Hasil Analisis FSVA, 2022

Dari 26 Kelurahan di Kota Singkawang, 2 kelurahan masuk dalam prioritas 1 (7,69 %), 4 kelurahan prioritas 2 (15,38 %) dan 8 kelurahan prioritas 3 (30,77 %).

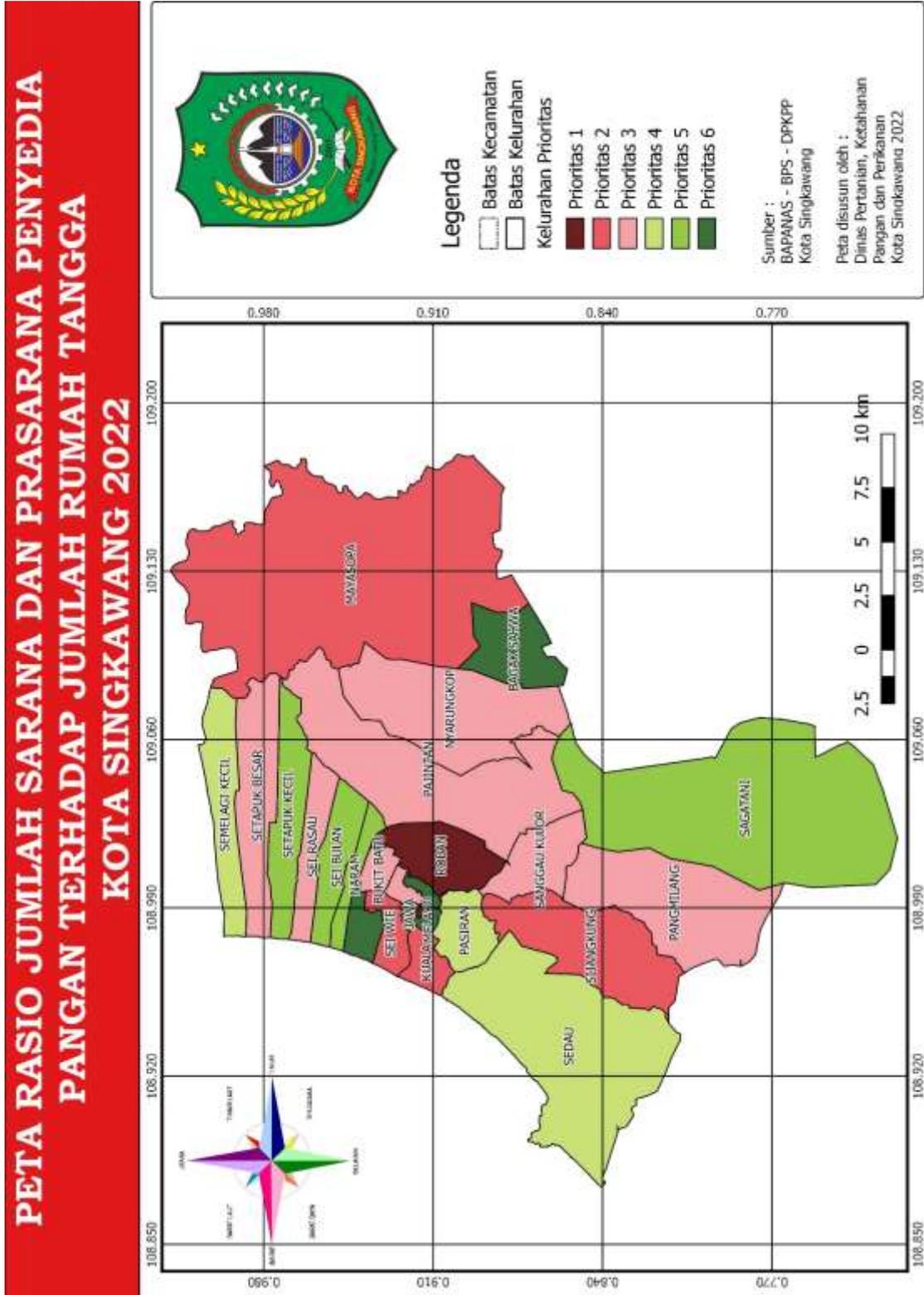
Tabel 2.2 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	$\leq 0,0285$	2	7,69
2	$> 0,0285 - 0,0379$	4	15,38
3	$> 0,0379 - 0,0649$	8	30,77
4	$> 0,0649 - 0,0769$	3	11,54
5	$> 0,0769 - 0,0922$	5	19,23
6	$> 0,0922$	4	15,38



Gambar 2.1 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

Peta 1.1 Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga



2.2. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang dari tahun 2010-2021 mencapai 1,61% per tahun sementara pertumbuhan produksi padi tahun 2021 naik 7,10% dibanding tahun 2020. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 30,77%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Sektor pangan, pertanian dan perikanan merupakan bagian penting dalam pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang. Pembangunan sektor pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan bertujuan untuk Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ketahanan pangan, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sesuai dengan Misi Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019. Namun demikian upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terwujudnya ketahanan pangan tersebut dihadapkan dengan kondisi rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penerapan teknologi, alih fungsi lahan, terjadinya perubahan iklim, dan permasalahan lainnya di lapang menjadi pemicu rendahnya tingkat produksi dan produktivitas dalam skala usaha tani, masih rendahnya mutu produksi serta belum optimalnya penganeka ragaman komoditi dan produk olahannya. Oleh karena itu arah Pembangunan sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan di Kota Singkawang pada periode 5 tahun kedepan berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas serta penganekaragaman komoditi dan produk olahan yang berdaya saing dan dalam memasuki pangsa pasar global sebagai upaya mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

Fokus dalam menjalankan misi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan adalah pada Misi ke 3 yaitu ; **Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumberdaya alam, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat.** Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian kota yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, perternakan dan perikanan sebagai salah satu potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat, maka Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang melalui rencana strategis periode 2018-2022 telah menyusun beberapa program tahun 2022 yang terkait dengan penanganan ketersediaan pangan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, meliputi kegiatan :
 - a. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penyuluh Pertanian
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B
 - b. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long storage
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya

6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kota Singkawang

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB III

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten/Kota, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan; dan (2) Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kota Singkawang. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2010-2021 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin Kota Singkawang sebesar 11,03 ribu jiwa (4,83 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin tahun 2020 yang berjumlah 10,23 ribu jiwa (4,53 persen), berarti jumlah penduduk miskin naik sebesar 0,8 ribu jiwa (7,82 persen).

Tabel 3.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Singkawang

Keterangan	Tahun		
	2019	2020	2021
Persentase penduduk miskin (%)	4,91	4,53	4,83
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	10.900	10.230	11.030

Sumber: Singkawang Dalam Angka 2022, BPS

Tabel 3.1.

Analisis FSVA Tahun 2022 Berdasarkan Rasio Penduduk Miskin

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Prioritas Penduduk Miskin
1	SINGKAWANG SELATAN	6172010	6172010001	SEDAU	5
2		6172010	6172010002	SIJANGKUNG	4
3		6172010	6172010003	PANGMILANG	2
4		6172010	6172010004	SAGATANI	2
5	SINGKAWANG TIMUR	6172021	6172021001	PAJINTAN	3
6		6172021	6172021002	SANGGAU KULOR	2
7		6172021	6172021003	BAGAK SAHWA	2
8		6172021	6172021004	NYARUMKOP	1
9		6172021	6172021005	MAYASOPA	1
10	SINGKAWANG UTARA	6172030	6172030001	SEI GARAM HILIR	5
11		6172030	6172030002	NARAM	4
12		6172030	6172030003	SEI BULAN	5
13		6172030	6172030004	SEI RASAU	3
14		6172030	6172030005	SETAPUK KECIL	2
15		6172030	6172030006	SETAPUK BESAR	1
16		6172030	6172030007	SEMELAGI KECIL	2
17	SINGKAWANG BARAT	6172040	6172040001	PASIRAN	5
18		6172040	6172040002	MELAYU	5
19		6172040	6172040003	TENGAH	4
20		6172040	6172040004	KUALA	4
21	SINGKAWANG TENGAH	6172050	6172050001	ROBAN	4
22		6172050	6172050002	CONDONG	5
23		6172050	6172050003	SEKIP LAMA	4
24		6172050	6172050004	JAWA	5
25		6172050	6172050005	BUKIT BATU	4
26		6172050	6172050006	SEI WIE	4

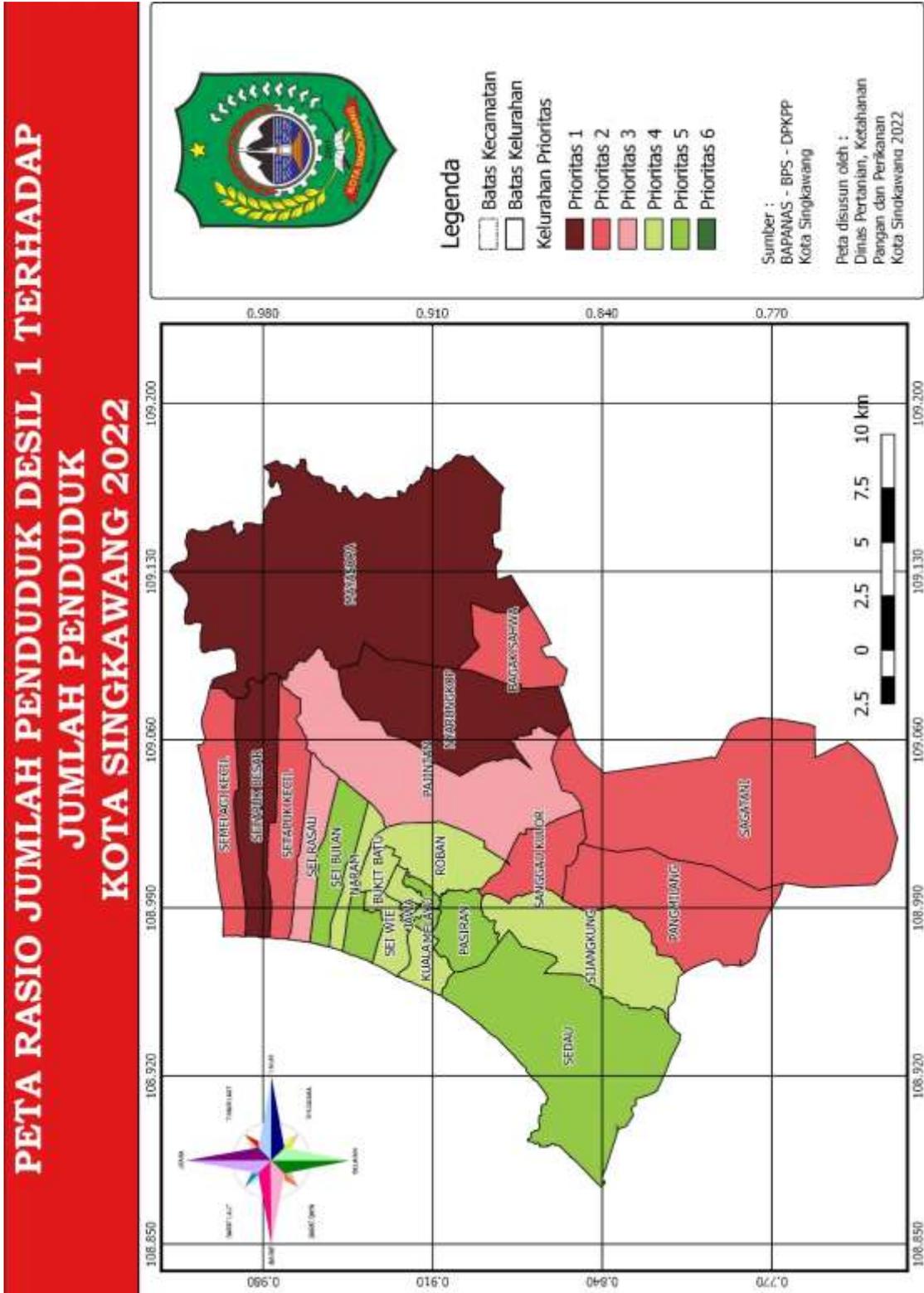
Sumber : Hasil Analisis FSVA, 2022

Pada tingkat kelurahan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2021, terdapat 3 kelurahan yang memiliki rasio rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas 11,54% (Prioritas 1). Sebanyak 6 kelurahan (23,08%) masuk prioritas 2, dan 2 kelurahan (7,69%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan kota ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 3 kelurahan tersebut.

Tabel 3.2. Sebaran kelurahan dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	0,1336	3	11,54%
2	0,0918 - 0,1336	6	23,08%
3	0,0762 - 0,0918	2	7,69%
4	0,0515 - 0,0762	8	30,77%
5	0,0214 - 0,0515	7	26,92%
6	0,0214	-	-

Peta 2.1 Rasio Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk



3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur salah satu penyebab terjadinya kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi kehidupan yang berkelanjutan.

Tabel 3.4.

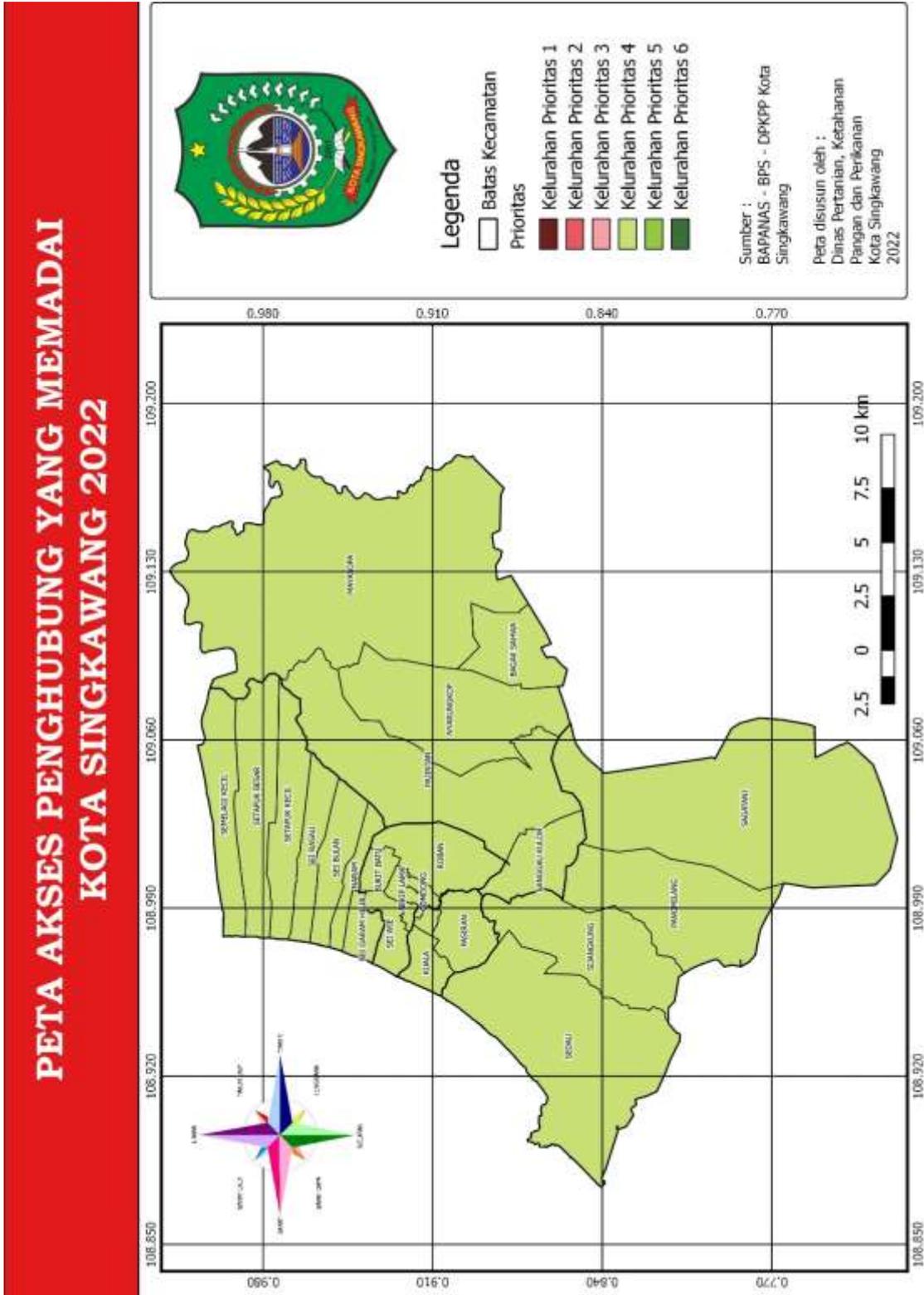
Analisis FSVA Tahun 2022 Berdasarkan Akses Transportasi

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Prioritas Transpor tasi
1	SINGKAWANG SELATAN	6172010	6172010001	SEDAU	4
2		6172010	6172010002	SIJANGKUNG	4
3		6172010	6172010003	PANGMILANG	4
4		6172010	6172010004	SAGATANI	4
5	SINGKAWANG TIMUR	6172021	6172021001	PAJINTAN	4
6		6172021	6172021002	SANGGAU KULOR	4
7		6172021	6172021003	BAGAK SAHWA	4
8		6172021	6172021004	NYARUMKOP	4
9		6172021	6172021005	MAYASOPA	4
10	SINGKAWANG UTARA	6172030	6172030001	SEI GARAM HILIR	4
11		6172030	6172030002	NARAM	4
12		6172030	6172030003	SEI BULAN	4
13		6172030	6172030004	SEI RASAU	4
14		6172030	6172030005	SETAPUK KECIL	4
15		6172030	6172030006	SETAPUK BESAR	4
16		6172030	6172030007	SEMELAGI KECIL	4
17	SINGKAWANG BARAT	6172040	6172040001	PASIRAN	4
18		6172040	6172040002	MELAYU	4
19		6172040	6172040003	TENGAH	4
20		6172040	6172040004	KUALA	4
21	SINGKAWANG TENGAH	6172050	6172050001	ROBAN	4
22		6172050	6172050002	CONDONG	4
23		6172050	6172050003	SEKIP LAMA	4
24		6172050	6172050004	JAWA	4
25		6172050	6172050005	BUKIT BATU	4
26		6172050	6172050006	SEI WIE	4

Sumber : Hasil Analisis FSVA, 2022

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa diolah BKP) 2021, semua kelurahan di Kota Singkawang memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun.

Peta 2.2 Akses Penghubung Yang Memadai



3.3. Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pemerintah Kota Singkawang dalam menanggulangi kemiskinan dapat diwujudkan melalui program verifikasi dan validasi kepersetaan khusus warga miskin dan tidak mampu. Dengan tujuan agar terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi beban masyarakat miskin dan tidak mampu dalam pembiayaan Kesehatan,

Program penanganan kemiskinan meliputi :

1. Program Bantuan Pangan Non Tunai / Bantuan Sembako
2. Program Keluarga Harapan
3. Program Jaminan Kesehatan

Kebijakan dan program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan salah satunya perlu diarahkan pada dukungan fasilitas pengulas akses masyarakat terhadap kredit mikro (usaha kecil dan menengah). Pemerintah perlu mempertahankan pengembangan ekonomi pro-masyarakat miskin untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Singkawang.

BAB IV

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (seperti saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di kelurahan. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak³. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

³ Permenkes 416 Tahun 1990

Tabel 4.1.

Analisis FSVA Tahun 2022 Berdasarkan Rasio Akses Air Bersih

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Prioritas Air Bersih
1	SINGKAWANG SELATAN	6172010	6172010001	SEDAU	4
2		6172010	6172010002	SIJANGKUNG	4
3		6172010	6172010003	PANGMILANG	3
4		6172010	6172010004	SAGATANI	2
5	SINGKAWANG TIMUR	6172021	6172021001	PAJINTAN	6
6		6172021	6172021002	SANGGAU KULOR	2
7		6172021	6172021003	BAGAK SAHWA	6
8		6172021	6172021004	NYARUMKOP	4
9		6172021	6172021005	MAYASOPA	2
10	SINGKAWANG UTARA	6172030	6172030001	SEI GARAM HILIR	3
11		6172030	6172030002	NARAM	2
12		6172030	6172030003	SEI BULAN	3
13		6172030	6172030004	SEI RASAU	2
14		6172030	6172030005	SETAPUK KECIL	3
15		6172030	6172030006	SETAPUK BESAR	2
16		6172030	6172030007	SEMELAGI KECIL	3
17	SINGKAWANG BARAT	6172040	6172040001	PASIRAN	5
18		6172040	6172040002	MELAYU	6
19		6172040	6172040003	TENGAH	5
20		6172040	6172040004	KUALA	4
21	SINGKAWANG TENGAH	6172050	6172050001	ROBAN	4
22		6172050	6172050002	CONDONG	5
23		6172050	6172050003	SEKIP LAMA	4
24		6172050	6172050004	JAWA	6
25		6172050	6172050005	BUKIT BATU	3
26		6172050	6172050006	SEI WIE	3

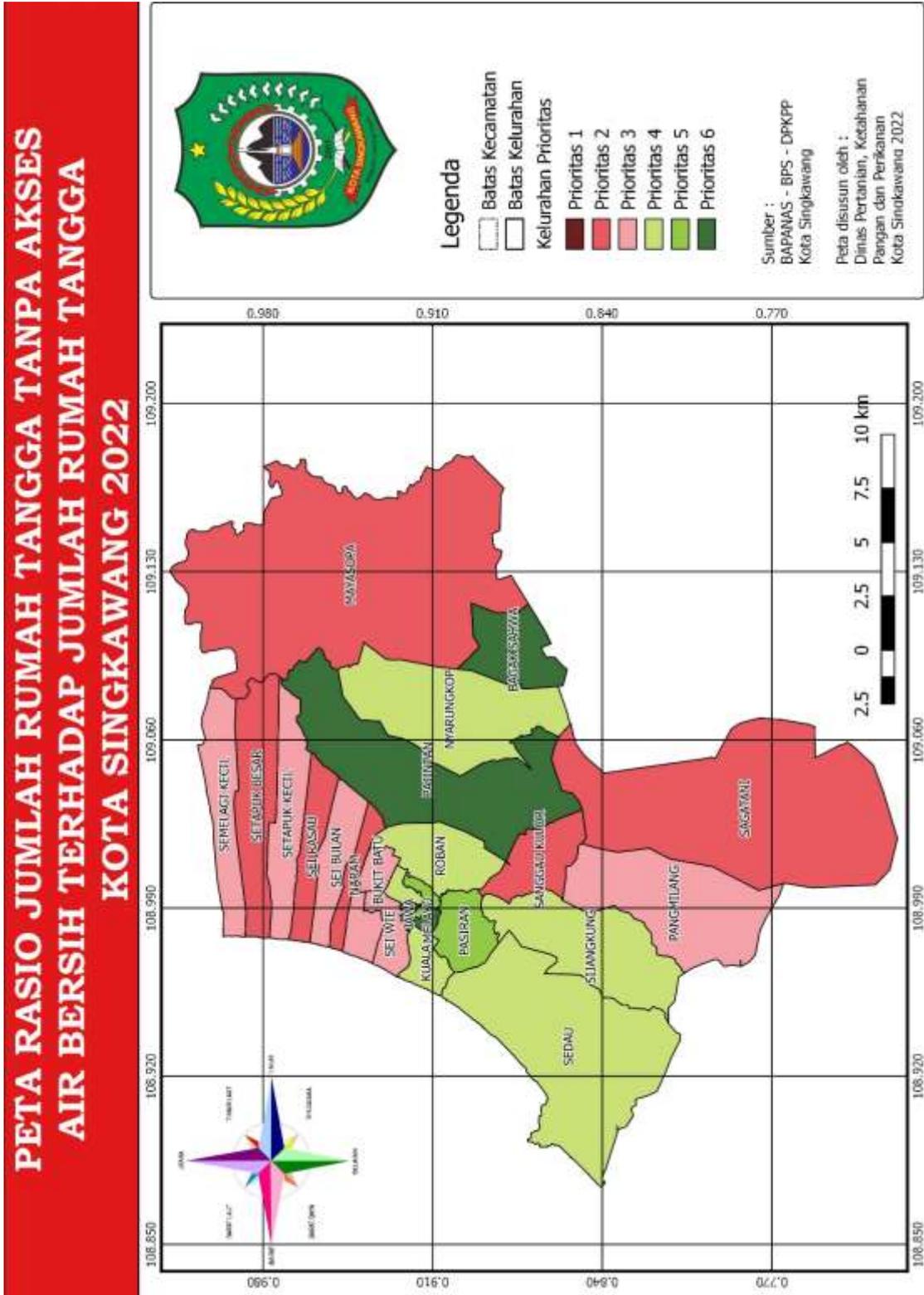
Sumber : Hasil Analisis FSVA, 2022

Tabel 4.2 Sebaran kelurahan berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	0,4019	-	-
2	0,3317 - 0,4019	6	23,08%
3	0,2514 - 0,3317	7	26,92%
4	0,1631 - 0,2514	6	23,08%
5	0,0849 - 0,1631	3	11,54%
6	0,0849	4	15,38%

Pada tingkat kelurahan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diolah DPPKP Kota Singkawang , terdapat 6 kelurahan yang memiliki rasio rumah tangga tanpa akses air bersih 23,08% (Prioritas 2). dan 7 kelurahan (26,92%) masuk Prioritas 3.

Peta 3.1 Rasio Akses Air Bersih



4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah kelurahan untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 4.3

Analisis FSVA Tahun 2022 Berdasarkan Rasio Tenaga Kesehatan

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Prioritas Tankes
1	SINGKAWANG SELATAN	6172010	6172010001	SEDAU	4
2		6172010	6172010002	SIJANGKUNG	4
3		6172010	6172010003	PANGMILANG	4
4		6172010	6172010004	SAGATANI	3
5	SINGKAWANG TIMUR	6172021	6172021001	PAJINTAN	4
6		6172021	6172021002	SANGGAU KULOR	4
7		6172021	6172021003	BAGAK SAHWA	4
8		6172021	6172021004	NYARUMKOP	4
9		6172021	6172021005	MAYASOPA	4
10	SINGKAWANG UTARA	6172030	6172030001	SEI GARAM HILIR	5
11		6172030	6172030002	NARAM	4
12		6172030	6172030003	SEI BULAN	4
13		6172030	6172030004	SEI RASAU	4
14		6172030	6172030005	SETAPUK KECIL	4
15		6172030	6172030006	SETAPUK BESAR	4
16		6172030	6172030007	SEMELAGI KECIL	4
17	SINGKAWANG BARAT	6172040	6172040001	PASIRAN	6
18		6172040	6172040002	MELAYU	5
19		6172040	6172040003	TENGAH	6
20		6172040	6172040004	KUALA	5

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Prioritas Tankes
21	SINGKAWANG TENGAH	6172050	6172050001	ROBAN	5
22		6172050	6172050002	CONDONG	6
23		6172050	6172050003	SEKIP LAMA	6
24		6172050	6172050004	JAWA	5
25		6172050	6172050005	BUKIT BATU	5
26		6172050	6172050006	SEI WIE	5

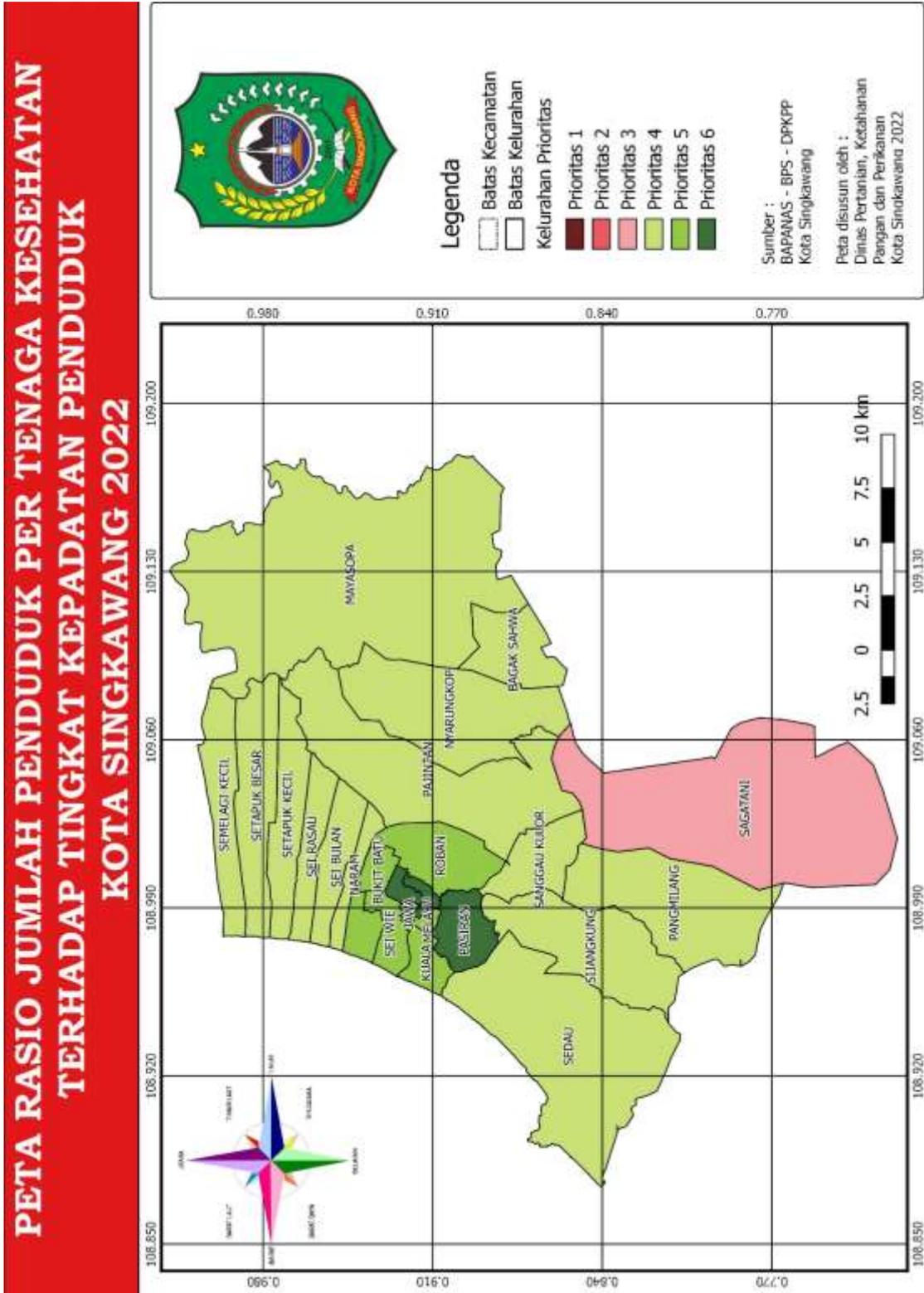
Sumber : Hasil Analisis FSVA, 2022

Tabel 4.4 Sebaran rasio tenaga kesehatan di kelurahan berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	1,6427	-	-
2	1,0221 – 1,6427	-	-
3	0,5830 – 1,0221	1	3,85%
4	0,1436 – 0,5830	14	53,85%
5	0,0453 – 0,1436	7	26,92%
6	0,0453	4	15,38%

Pada tingkat kelurahan berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kota Singkawang, terdapat 1 kelurahan yang memiliki rasio tenaga Kesehatan di kelurahan 3,85% (Prioritas 3) yaitu kelurahan Sagatani kecamatan Singkawang Selatan. Namun kondisi dilapangan menunjukkan bahawa akses masyarakat khususnya kelurahan Sagatani untuk memperoleh pelayanan kesehatan sangat mudah. Kondisi ini sangat didukung dengan adanya Puskesmas di kelurahan setempat dan jarak kelurahan Sagatani dengan Rumah Sakit yang berada dipusat Kota hanya sekitar 15 Km.

Peta 3.2 Rasio Tenaga Kesehatan



4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

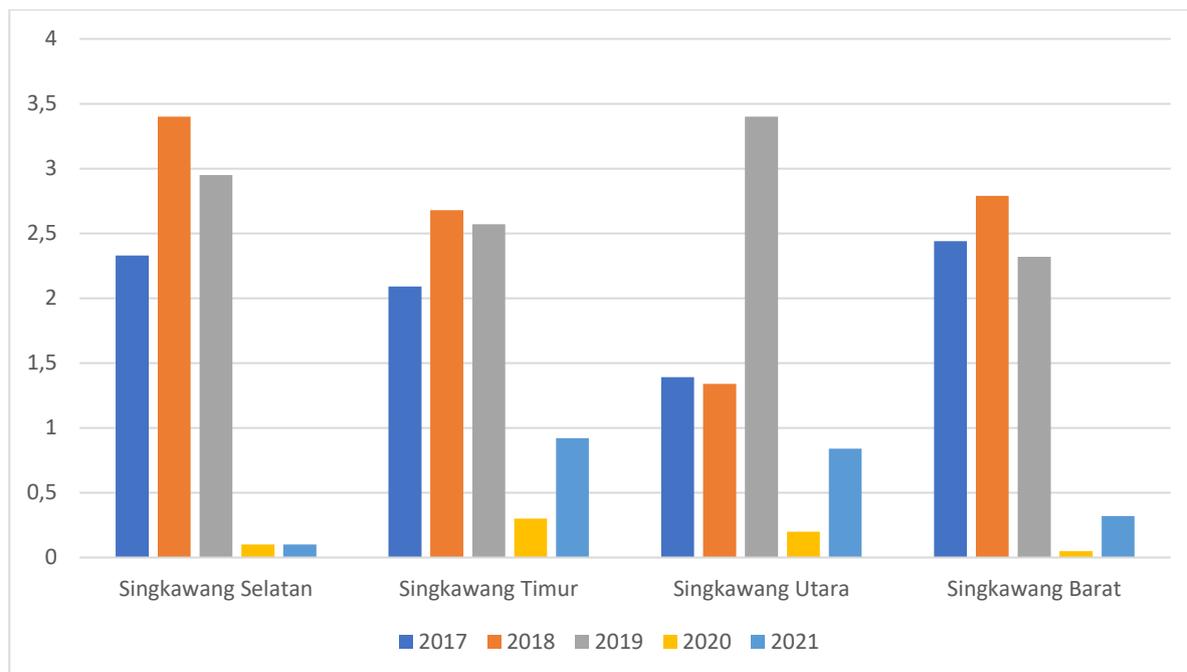
1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Persentase penderita gizi buruk di Kota Singkawang pada tahun 2017-2021 mengalami penurunan dari 1,89% pada tahun 2020 menjadi 0,44% pada tahun 2021. Persentase penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Singkawang Timur (0,92%) dan Kecamatan Singkawang Utara (0,84%), dan terendah ditemukan di Kecamatan Singkawang Barat (0,32%) dan Kecamatan Singkawang Tengah (0,15%).

Tabel 4.5 Persentase Penderita Gizi Buruk 2017-2021

No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Singkawang Selatan	2,33	3,40	2,95	0,10	0,00
2	Singkawang Timur	2,09	2,68	2,57	0,30	0,92
3	Singkawang Utara	1,39	1,34	3,40	0,20	0,84
4	Singkawang Barat	2,44	2,79	2,32	0,05	0,32
5	Singkawang Tengah	0,48	0,12	0,76	0,06	0,15
	Total	1,15	1,46	1,89	1,89	0,44

Sumber : Singkawang Dalam Angka 2022, BPS



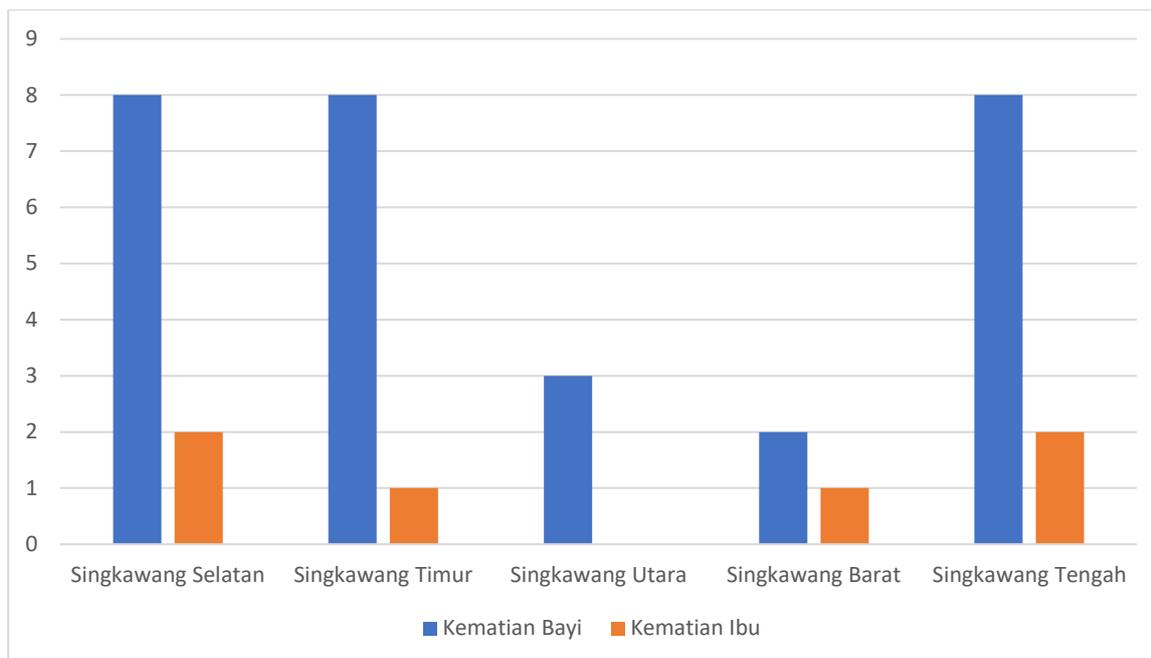
Gambar 3.1 Grafik Persentase Penderita Gizi Buruk Kota Singkawang 2017 - 2021

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita pada Tahun 2021 di Kota Singkawang adalah 29 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan Tahun 2021 di Kota Singkawang 6 jiwa. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.6 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan
1	Singkawang Selatan	8	2
2	Singkawang Timur	8	1
3	Singkawang Utara	3	-
4	Singkawang Barat	2	1
6	Singkawang Tengah	8	2
	Total	29	6

Sumber : Singkawang Dalam Angka 2022, BPS



Gambar 3.2. Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

4.4. STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN

Masalah gizi kronis (*stunting*) masih tetap tinggi di Kota Singkawang, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama *stunting* dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi *stunting*, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat

nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi yang bersifat multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasinya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
 - b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya dirawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
 - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani), sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi *stunting* pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut bersifat multisektor.

 - a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
 - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi

- atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (*sprinkle*) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
- Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
 - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
 - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas-fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Kementerian Kesehatan.
 - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi dibidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB V

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan pada Bab 2, 3 dan 4. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, kelurahan-kelurahan dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Tabel 5.1

Analisis FSVA Tahun 2022 Berdasarkan Komposit

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Prioritas Komposit
1	SINGKAWANG SELATAN	6172010	6172010001	SEDAU	4
2		6172010	6172010002	SIJANGKUNG	3
3		6172010	6172010003	PANGMILANG	2
4		6172010	6172010004	SAGATANI	2
5	SINGKAWANG TIMUR	6172021	6172021001	PAJINTAN	4
6		6172021	6172021002	SANGGAU KULOR	3
7		6172021	6172021003	BAGAK SAHWA	5
8		6172021	6172021004	NYARUMKOP	2
9		6172021	6172021005	MAYASOPA	1

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Prioritas Komposit
10	SINGKAWANG UTARA	6172030	6172030001	SEI GARAM HILIR	5
11		6172030	6172030002	NARAM	4
12		6172030	6172030003	SEI BULAN	4
13		6172030	6172030004	SEI RASAU	2
14		6172030	6172030005	SETAPUK KECIL	3
15		6172030	6172030006	SETAPUK BESAR	2
16		6172030	6172030007	SEMELAGI KECIL	3
17	SINGKAWANG BARAT	6172040	6172040001	PASIRAN	6
18		6172040	6172040002	MELAYU	6
19		6172040	6172040003	TENGAH	4
20		6172040	6172040004	KUALA	3
21	SINGKAWANG TENGAH	6172050	6172050001	ROBAN	3
22		6172050	6172050002	CONDONG	6
23		6172050	6172050003	SEKIP LAMA	4
24		6172050	6172050004	JAWA	6
25		6172050	6172050005	BUKIT BATU	3
26		6172050	6172050006	SEI WIE	3

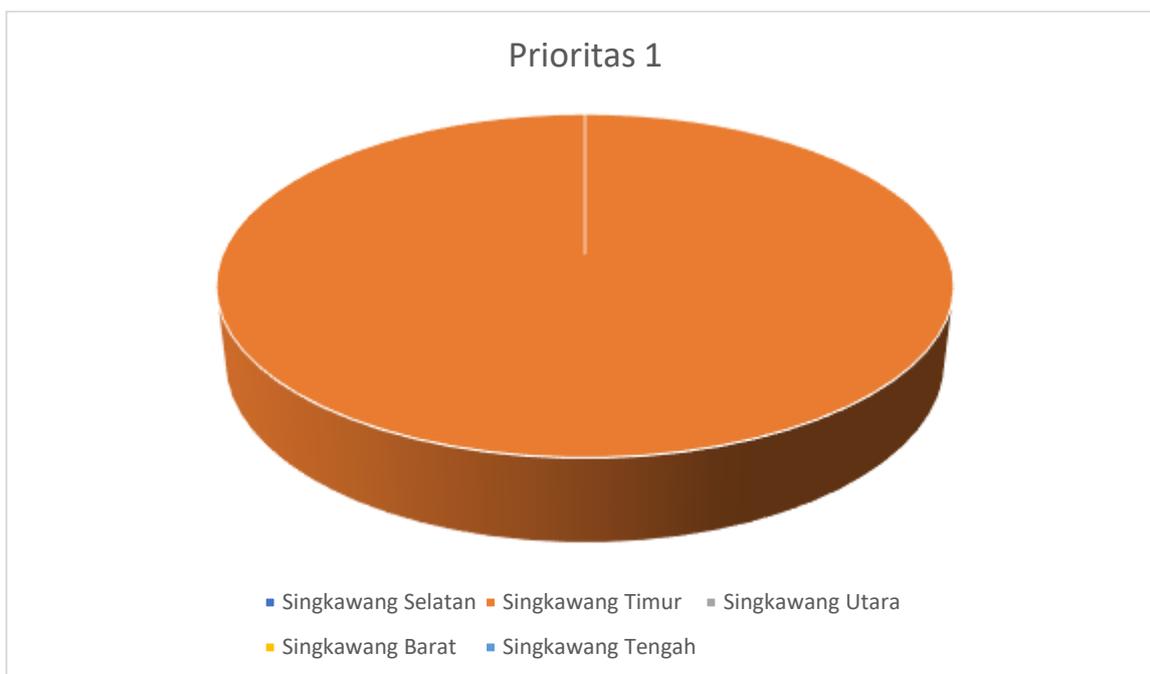
Sumber : Hasil Analisis FSVA, 2022

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 26 kelurahan yang ada di Kota Singkawang maka didapatkan 1 kelurahan yaitu Kelurahan Mayasopa (Prioritas 1), 5 kelurahan yaitu Kelurahan Sagatani, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Nyarumkop (Prioritas 2), 8 kelurahan yaitu Kelurahan Sangau Kulor, Kelurahan Semelagi Kecil Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sungai Wie, Kelurahan Roban, Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Kuala (Prioritas 3), 6 kelurahan yaitu Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sedau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, Kelurahan Sekip Lama dan Kelurahan Tengah (Prioritas 4), 2 kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Garam dan Kelurahan Bagak Sahwa (Prioritas 5) dan 4 kelurahan yaitu Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, Kelurahan Condong, dan Kelurahan Jawa (Prioritas 6).

Tabel 5.2. Sebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan Prioritas

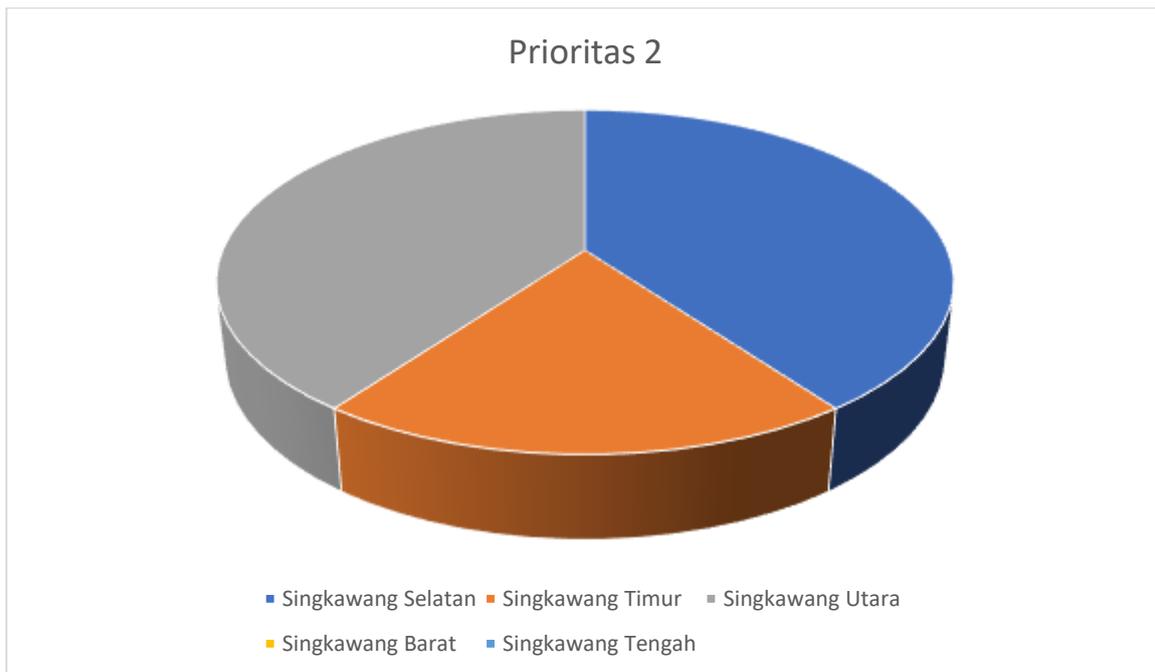
Prioritas	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	1	3,85
2	5	19,23
3	8	30,77
4	6	23,08
5	2	7,69
6	4	15,38

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 terdapat di wilayah Kecamatan Singkawang Selatan (1 kelurahan), Kecamatan Singkawang Timur (1 kelurahan) (Gambar 4.1).



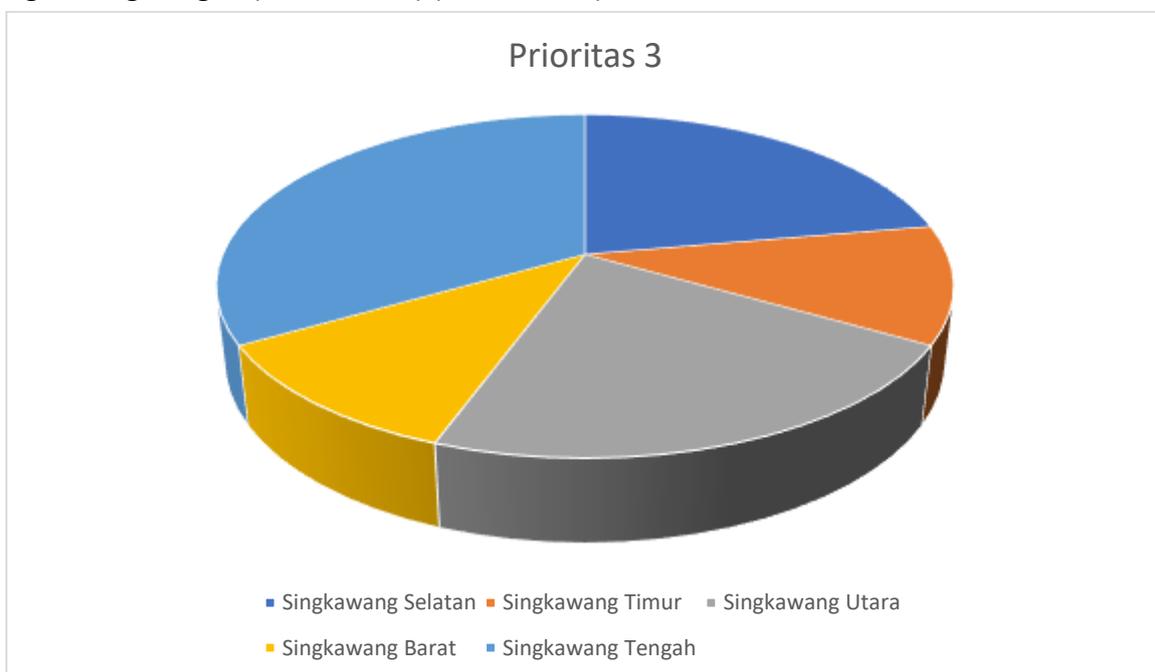
Gambar 4.1 Sebaran Jumlah Kelurahan Priroitas 1 Per Kecamatan

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Singkawang Timur (1 kelurahan), Kecamatan Singkawang Selatan (2 kelurahan) dan Kecamatan Singkawang Utara (2 kelurahan) (Gambar 4.2).



Gambar 4.2 Sebaran Jumlah Kelurahan Piroitas 2 per Kecamatan

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Singkawang Selatan (1 kelurahan), Kecamatan Singkawang Utara (2 kelurahan), Kecamatan Singkawang Barat (1 kelurahan), Kecamatan Singkawang Barat (1 kelurahan) dan Kecamatan Singkawang Tengah (3 kelurahan) (Gambar 4.3).



Gambar 4.3 Sebaran Jumlah Kelurahan Piroitas 3 Per Kecamatan

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1 secara umum disebabkan oleh: (1) Aspek Ketersediaan Pangan (Keterbatasan sarana penyedia pangan (2) Aspek terhadap pangan (Daya beli terbatas karena kemiskinan), dan (3) Aspek Pemanfaatan Pangan (Terbatasnya akses terhadap air bersih).

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh: (1) Aspek Ketersediaan Pangan (Keterbatasan sarana penyedia pangan (2) Aspek terhadap pangan (Daya beli terbatas karena kemiskinan), dan (3) Aspek Pemanfaatan Pangan (Terbatasnya akses terhadap air bersih).

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh: (1) Aspek Ketersediaan Pangan (Keterbatasan sarana penyedia pangan (2) Aspek terhadap pangan (Daya beli terbatas karena kemiskinan), dan (3) Aspek Pemanfaatan Pangan (Terbatasnya akses terhadap air bersih).

BAB VI

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (kelurahan), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah kelurahan diprioritaskan pada:

- Kelurahan-kelurahan prioritas 1-3 yang tersebar di Kecamatan Singkawang Selatan, Kecamatan Singkawang Timur, Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah.
- Kelurahan-kelurahan yang lokasinya jauh dari ibu kota atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain.
- Kelurahan-kelurahan yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusianya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di kelurahan seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 5.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penyediaan tenaga kesehatan.